

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kebijakan yang dibuat oleh negara merupakan perwujudan dari apa yang ingin dicapai oleh sebuah negara, dan hal tersebut menjadi kepentingan nasional atau *national interest*. Salah satunya adalah kebijakan pemerintah Myanmar dalam pelarangan operasi INGO Kemanusiaan MSF di wilayah Rakhine 2014. Dari pembahasan yang telah penulis buat pada bab sebelumnya, penulis dalam mengambil kesimpulan bahwa kebijakan pelarangan operasi NGO Kemanusiaan MSF di wilayah Rakhine tahun 2014 dibuat dengan beberapa tahapan.

Tahapan yang pertama adalah tahapan dimana pemerintah Myanmar ditentukan sebagai aktor nasional pembuat kebijakan beserta kepentingan nasional yang menjadi tujuan dirumuskannya kebijakan, yakni mewujudkan program pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan bagi rakyat Myanmar yang tercantum pada *National Health Plan*.

Tahapan yang kedua adalah dimana pemerintah Myanmar memfokuskan permasalahan yang muncul sebagai hasil proses investigasi insiden 13 Januari 2014 di desa Ducheeratan. Permasalahannya adalah perilaku dari MSF terkait kesaksiannya mengenai insiden yang terjadi di Ducheraatan dan ketidak-sanggupan MSF menjaga nilai-nilai netralitas sesuai dengan kesepakatan yang dibuatnya oleh Pemerintah Myanmar.

Tahapan yang ketiga adalah upaya pemerintah Myanmar dalam memberikan klarifikasi mengenai hasil investigasi yang dilakukan oleh beberapa tim, melalui *press conference* Menteri Luar Negeri Myanmar H. E. U Wunna Maung Lwin. Poin pertama adalah bahwa MSF terindikasi telah menyalahi nilai-nilai netralitas yang ada pada kesepakatan yang telah dibuat dengan pemerintah Myanmar. Sehingga pemerintah Myanmar perlu memberikan sanksi bagi MSF.

Tahapan yang keempat yakni tahapan terakhir dimana pemerintah memutuskan untuk memberikan sanksi kepada MSF dengan memberhentikan operasi MSF di wilayah Rakhine. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kepentingan nasional dalam program memenuhi kebutuhan dan pelayanan kesehatan rakyat Myanmar sesuai dengan *National Health Plan*, menggabungkan opsi kebijakan pelarangan dengan mengganti peran MSF dengan pemerintah Myanmar dalam *supply* layanan kesehatan di Rakhine dan juga berdasarkan kerugian yang harus ditanggung oleh pemerintah Myanmar dalam hal kecemasan dari dunia Internasional dan sanksi-sanksi yang kemungkinan pemerintah Myanmar dapatkan jika opsi kebijakan tersebut dipilih, dan berdasarkan pada keuntungan dalam hal hubungan pemerintah Myanmar dengan MSF ke depannya.

Penulis menyadari bahwa tiap-tiap negara di dunia memiliki cara-cara tersendiri dalam hal proses pembuatan kebijakan, salah satunya Myanmar. Pemerintah Myanmar mungkin pada kenyataannya tidak menggunakan Model Aktor Rasional milik Graham T. Allison dalam proses pembuatannya. Ada kemungkinan kebijakan pemerintah Myanmar dibuat berdasarkan pemikiran satu hingga dua orang saja, yang memang memiliki wewenang untuk merumuskan hal tersebut. Sehingga disini pemerintah Myanmar hanya sebagai

simbol dalam proses peluncuran atau penetapan sebuah kebijakan. Jadi bukannya tidak mustahil jika ada kepentingan-kepentingan individu atau golongan yang terselip pada kebijakan tersebut, seperti contohnya menyingkirkan etnis minoritas yang ada di wilayahnya dengan cara menjauhkan etnis minoritas tersebut dari bantuan-bantuan.

6.2 Saran

Penulis selama masa penulisan penelitian ini mengalami kesulitan dalam hal mendapatkan akses data tentang kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan oleh negara yang menjadi objek penelitian. Hal tersebut dikarenakan negara yang menjadi objek penelitian yang penulis teliti ini yakni Myanmar, adalah negara yang tertutup dalam hal publikasi data khususnya ketika Myanmar masih dalam rezim kekuasaan junta militer. Sehingga saran penulis kepada para pembaca dan penulis-penulis lain yang ingin juga membahas tentang pembuatan kebijakan, pilihlah negara sebagai objek penelitian, yang memiliki keterbukaan dalam hal akses data-data resmi yang tentunya ke-absahannya telah terbukti. Hal tersebut akan memudahkan proses penelitian yang akan dilakukan.

Saran dari penulis untuk pemerintah Myanmar dalam hal pembuatan kebijakan adalah pemerintah Myanmar perlu memperhatikan aspek kemanusiaan dalam proses pembuatan kebijakan khususnya yang menyangkut kelangsungan hidup manusia, terlepas dari latar belakang etnis, ras, maupun agama. Karena dengan melarang operasi sebuah lembaga kemanusiaan yang memang memiliki tujuan untuk memberikan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan, sama artinya dengan melarang mereka untuk bertahan hidup, dan hal tersebut

merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Jika aspek kemanusiaan tetap tidak mampu mengubah keputusan yang telah dibuat, harusnya pemerintah Myanmar menyiapkan pengganti sementara MSF, sebagai lembaga yang mampu memberikan pertolongan pertama kepada korban-korban yang membutuhkan, jika selama masa pelarangan MSF tersebut terjadi kembali insiden kekerasan atau konflik komunal seperti yang sudah terjadi. Sehingga pemerintah Myanmar masih memiliki tanggung jawab atas apa yang menjadi keputusannya.